BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6 yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum I”, kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg)* dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan Bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di Daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan jalan Raya Pos yang sedang dibangun (Pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/ awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke

Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang).

Tidak diketahui secara Pasti, berapa lama Kota Bandung dibangung. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah pendiri (The *Founding Father)* Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota Baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Tabel 2. 1
WALIKOTA Bandung Tahun 1966 – Sekarang

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	E.A. Maurenbrecher (exofficio)	1906 - 1907
2.	R.E. Krijboom (exofficio)	1907 - 1908
3.	J.A. van Der Ent (exofficio)	1909 - 1910
4.	J.J. Verwijk (exofficio)	1910 - 1912
5.	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912 - 1913
6.	B. van Bijveld (exofficio)	1913 - 1920
7.	B. Coops	1920 - 1921
8.	S.A. Reitsma	1921 - 1928
9.	B. Coops	1928 - 1934
10.	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934 - 1936
11.	Mr. J.M. Wesselink	1936 - 1941
12.	R.A. Atmadinata	1941 -1945
13.	R. Syamsoerizal	1945 - 1947
14.	Ir. Oekar Bratakoesoemah	1947 – 1949
15.	R. Enoch	1949 - 1957
16.	R. Priatna Kusumah	1957 – 1966
17.	R. Didi Djukardi	1966 – 1968
18.	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968 – 1970
19.	R. Otje Djoendjoenan Setiakusumah	1971 – 1976
20.	H.Utju Djoenaedi	1976 – 1978

NO	NAMA	MASA JABATAN
21.	R. Husen Wangsaatmadja	1978 – 1983
22.	H. Ateng Wahyudi	1983 - 1988 – 1993
23.	H. Wahyu Hamidjaja	1993 – 1998
24.	H. AA Tarmana	1998 – 2003
25.	H. Dada Rosada .SH. Msi	2003 – 2013
26.	M.Ridwal Kamil, ST., MUD	2013 - 2018

Sumber : www.bandung.go.id

Adapun Penjelasan dari kronologi sejarah Kota Bandung dari Masa ke Masa yang akan dijelaskan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2
Kronologi Sejarah Kota Bandung

MASA	PERISTIWA
1488	Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran
1799	Menjadi bagian dari Sumedang Larang diserahkan kepada Pemerintah Belanda dari Kompeni
1811	Dinyatakan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung
1906	Gemeente Bandoeng
1917	Burgemeester Van Bandoeng yang pertama
1926	Staadsgemeente Bandoeng
1942	Bandung Si
1945	Pemerintah Nasional kota Bandung
1949	Haminte Bandung
1950	Kota Besar Bandung
1957	Kotapraja Bandung
1966	Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
1974	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Sumber : www.bandung.go.id

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan landasan organisasi untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas, sehingga koordinasi structural dapat dilaksanakan guna menunjang aktivitas dan tujuan perusahaan. Strukur organisasi ini diatur

hubungan dari pemimpin yang satu ke pemimpin yang lainnya, baik ke bawah maupun ke atas. Untuk menjamin Kelancaran dan keberhasilan setiap kegiatan, diperlukan struktur organisasi, karena struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelompokan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap bagian dalam organisasi tersebut.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi beberapa sub bagian.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Perekonomian secara umum sebagai berikut :

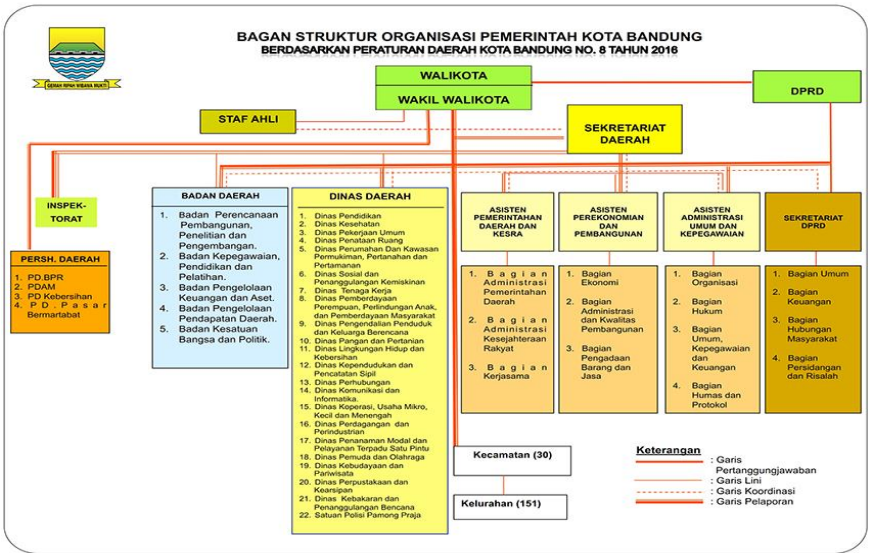

Sumber : https://ppid.bandung.go.id

Gambar 2. 1

Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

A. Kepala Bagian Perekonomian

Kepala Bagian Perekonomian memiliki tugas :

a. penyusunan bahan, pengoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
b. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
c. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah; pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Bina Potensi Dan Pengembangan
b. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Dan Distribusi
c. Kepala Sub Bagian Bina Investasi Dan Pengembangan Usaha Daerah

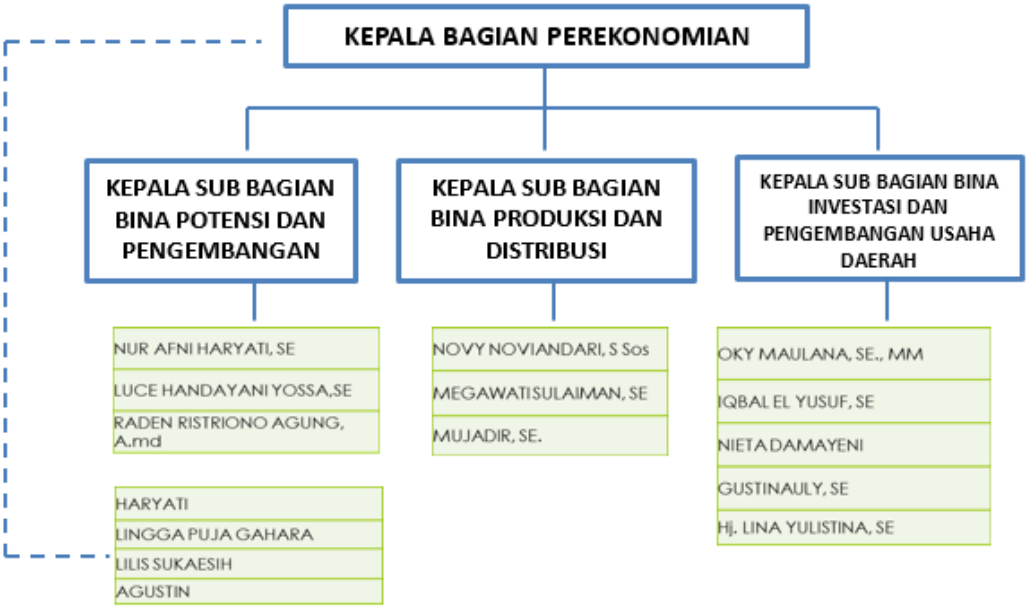

Sumber : *https://portal.bandung.go.id*

Gambar 2. 2
Gambar Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Ekonomi

2.3 Deskripsi Jabatan

Adapun deskripsi tugasnya masing-masing sesuai struktur organiasai Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretarit Daerah Kota Bandung pada Paragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 23 menjelaskan bahwa kepala bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten perekonomian dan pembangunan lingkup perekonomian. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud kepala bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan

c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian

A. Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing

Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;

b) Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;

c) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;

d) Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina produksi dan distribusi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina produksi dan distribusi;

b) pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina produksi dan distribusi;

c) pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina produksi dan distribusi;

d) pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina produksi dan distribusi; dan

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah

Kepala Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina investasi dan pengembangan usaha Daerah menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
b) pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
c) pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
d) pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah; dan
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

2.4.1 Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing

a) Menyusun Program dan Renja Sub Bagian sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan ;
b) Memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
c) Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif
d) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Sekretariat Daerah agar tujuan dan sasaran tercapai;
e) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja da pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f) Melakukan pembinaan jasmanai dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g) Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing sebagai bahan perumusan kebijakan;

h) Melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;

i) Memfasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka pengembangan potensi produk-produk unggulan yang berdaya saing;

j) Melaksanakan pengkajian penciptaan iklim usaha yang kondusif;

k) Memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif;

l) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonomian kota lingkup bina potensi dan pengembangan daya asing;

m) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan LKIP Sekretariat Daerah, Penetapan kinerja Sekretariat Daerah, LKPJ Walikota, bahan LPPD dan bahan IPPD;

n) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan ketatausahaan bagian Perekonomian;

o) Memeriksa, memaraf dan / atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

p) Melaksanakan pengkajian / telaahan staf dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

q) Melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

r) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

s) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.4.2 Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

a) Menyusun program dan Renja Sub Bagian sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan ;

b) Memimpin, Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

d) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Sekretariat Daerah agar tujuan dan sasaran tercapai;

e) Membaina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan profuktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g) Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup bina produksi dan distribusi sebagai bahan perumusan kebijakan;

h) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, asistensi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonomian kota lingkup bina produksi dan distribusi yang meliputi pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi daerah, penataan pendistribusian produk barang dan jasa dan kajian analisis pasar daerah dalam rangka peningkatan perekonomian kota dan masyarakat;

i) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan perekonoman kota lingkup bina produksi dan distribusi;

j) Melaksanakan pengkajian perkembangan ekonomi makro kota;

k) Memeriksa, memaraf dan / atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

l) Melaksanakan pengkajian / telaahan staf dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

m) Melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.3 Sub Bagian Bina Investasi Dan Pengembangan Usaha Daerah

a) Menyusun program dan Renja Sub Bagian sesuai tugas dan fungsi sebagai pedomanam pelaksanaan;

b) Memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai deengan tugas dan fungsinya;

c) Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d) Mengarahkan tugas kepada bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kebijakan teknis opersional dalam rangka peningkatan perekonomian kota lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah yang meliputi kajian kelayakan kegiatan

usaha daerah/BUMD, fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah dan BUMD, evaluasi kinerja kegiatan usaha daerah dan BUMD serta Pengembangan investasi BUMD;

g) Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup bina investasi, pengembangan usaha daerah dan BUMD

h) Melaksanakan kajian kelayakan kegiatan bina investasi, pengembangan usaha daerah dan BUMD;

i) Memfasilitasi dan pembinaan administrasi bina investasi, usaha daerah dan BUMD

j) Memfasilitasi pengembangan bina investasi, pengembangan usaha daerah dan BUMD;

k) Membina Bawahan dengan cara memotivasi untuk meingkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian sesuai dengan tugan dan fungsinya;

l) Melaksanakan memfasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan/ atau Direksi pada BUMD;

m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bina investasi, pengembangan usaha daerah dan BUMD;

n) Memeriksa, memaraf dan/atai menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

o) Melaksanakan pengkajian/ telaahan staf dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

p) Melaksanakan hubungan kerja pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

q) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2.5 Profile Kecamatan Antapani Kota Bandung

2.5.1 Kondisi Eksisting Kecamatan Antapani

Kecamatan Antapani merupakan salah satu bagian wilayah Ujung Berung Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 400,543 Ha. Secara Administratif Kecamatan Antapani dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Buah Batu
2. Bagian Utara : Kecamatan Mandalajati
3. Bagian Timur : Kecamatan Arcamanik
4. Bagian Barat : Kecamatan Kiaracondong

Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Tabel Penggunaan Areal Tanah

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	-
2	Tanah Kering (Daratan)	1.737
3	Tanah Basah	-
4	Fasilitas Umum	81,243

Sumber : www.ppid.bandung.go.id

2.5.2 Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjai lingkup kerja Kecamatan Antapani dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2. 4
Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Antapani

Kecamatan	Kelurahan/Desa
Antapani	Antapani Kulon
	Antapani Wetan
	Antapani Tengah
	Antapani Kidul

Sumber : www.ppid.bandung.go.id

Secara geografis Kecamatan Antapani memiliki bentuk wilayah datar sebesar 100 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Antapani berada pada ketinggian 500m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Antapani berkisar 29°C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 55 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

2.6 Kependudukan

Kecamatan Antapani memiliki jumlah penduduk sebanyak 70.874 jiwa, yang terdiri dari 36.229 jiwa laki-laki dan 34.645 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Antapani saat ini mencapai sekitar 16.550 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2018 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 177 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Tabel 2. 5

Tabel Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Belum Sekolah	3.862	3.842	7.704
2	Tidak Tamat SD	2.374	2.586	4.960
3	Tamat SD	9.664	9.542	19.206
4	Tamat SLTP	4.641	4.608	9.249
5	Tamat SLTA	7.539	7.176	14.715
6	Sarjana Muda (D3)	4.436	4.170	8.606
7	Sarjana (S1)	3.503	2.991	6.434
8	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
9	Pasca (S3),dll	-	-	-

Sumber : www.ppid.bandung.go.id

Tabel 2. 6

Tabel Data Mata pencaharian Pokok

No.	Pekerjaan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Petani	**200**	**234**	**434**
2	Pelajar/Mahasiswa	11.919	10.940	22.853
3	Pegawai Swasta	6.728	5.317	12.045
4	Pedagang	3.139	4.008	7.147
5	Pegawai Negeri Sipil	4.685	1.849	8.534
6	TNI/POLRI	360	172	532
7	Pensiunan	2.467	2.584	5.051
8	Buruh Swasta	-	-	-
9	Pengrajin	17	10	27
10	Penjahit	45	37	82
11	Tukang Kayu	175	-	175
12	Dokter	125	110	235
13	Sopir/Pengemudi	-	-	-
14	Pengusaha	3.100	1.001	4.101
15	Lain-lain	3.059	6.593	9.658
	JUMLAH	36.019	34.855	70.874

Sumber : www.ppid.bandung.go.id

Tabel 2. 7
Tabel Data Kelembagaan Ekonomi

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Koperasi	18	
2	UKM	56	
3	Pasar Selapan/Umum	1	
4	Usaha Perdagangan	244	
5	Toko/Swalayan	1	
6	Warung Makan	118	
7	Restaurant	1	
8	Kios/Warung Kelontong	147	
9	Pedagan Kaki Lima	87	Terminal Cibatu dskl
10	Bank	3	
11	Industri Makanan	25	
12	Industri Kerajinan	7	
13	Industri Pakaian	2	
15	Percetakan/Sablon	13	
16	Bengkel Motor/Sepeda	3	
17	Bengkel Mobil	3	

Sumber : www.ppid.bandung.go.id